

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara. Sedangkan, pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar (Suandy, 2008, hlm. 1).

Peran penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber penerimaan Negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, yang dimuat dari CNN Indonesia pada 1 November 2015 mengenai penurunan target APBN 2016 tak terkait pemakzulan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif bahwa “Pemerintah menurunkan sejumlah target APBN salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3 persen dan turun dari target 5,7 persen pada APBNP 2015. Disamping pertumbuhan ekonomi yang targetnya diturunkan, beberapa target dalam APBN 2016 juga mengalami penurunan. Di antaranya inflasi yang diasumsikan sebesar 4,7 persen, lebih rendah dari APBNP 2015 yang 5 persen. Selain itu harga minyak diasumsikan US\$50, sedangkan di tahun 2015 diasumsikan US\$60. Angka pengangguran menjadi 5,2-5,5 persen, turun dari 5,6 persen pada 2015”. (Alfajri, 2016) mengatakan begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN memungkinkan

segala kegiatan pemerintahan dapat berjalan terus. Penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai

dari sektor perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, sampai pada subsidi BBM. Begitu pentingnya peran pajak bagi kelangsungan Negara, maka pajak selalu menjadi fokus pemerintah. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Putranti, Jati dan Tambunan (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh Negara, terutama atas transaksi bisnis lintas Negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam menjalankan fungsi intermediarynya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks : (i) bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema, dan (ii) bank sebagai *channel* yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik *tax avoidance*, adanya kerahasiaan bank (*bank secrecy*) perlu mendapat perhatian penting. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan. Sehubungan dengan adanya PER-01/PJ/2015, DJP dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar Negeri (Putranti, Jati dan Tambunan, 2015).

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya: (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*); (ii) penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*); dan (iii) pembukaan cabang di Negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Skema praktik

Cindi Ajeng Pratiwi, 2019

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman (Putranti, Jati dan Tambunan, 2015).

Sebagian besar bank-bank swasta nasional maupun bank pemerintah yang memiliki cabang di luar Negeri hanya berfungsi *remittance*. Selain itu, pembukaan kantor cabang di luar Negeri adalah untuk mendapatkan dana murah. Sebagai contoh tahun 2016 lalu perpajakan dunia di hebohkan dengan munculnya dokumen Panama Papers. Diketahui, dokumen tersebut menguak praktik menyembunyian aset dan penghindaran pajak yang dilakukan sejumlah pengusaha dan politisi. Hal menarik yang diungkap lainnya adalah bagaimana praktik menyembunyian aset dan penghindaran pajak modusnya dengan mendirikan perusahaan cangkang (*shell corporation*) di Negara-Negara yang dikenal dengan surga bebas pajak (*Tax Haven*).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih saja terjadi di Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Maka dari itu terjadinya penghindaran pajak ini umumnya banyak dilakukan oleh badan usaha dan politisi lainnya. Banyaknya perusahaan yang berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dan ingin memaksimalkan laba perusahaan yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak tersebut. Didukung oleh penelitian Masri dan Martani (2012) yang mengatakan bahwa pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Diantimala (2008) semakin besar total aset perusahaan, maka akan semakin besar ukuran perusahaan begitu juga sebaliknya, semakin rendah total aset perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain adalah total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan (*size*) ditunjukkan melalui log

Cindi Ajeng Pratiwi, 2019

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000, hlm. 259). Namun menurut Jimenez dan Angueira (2018) perusahaan dengan pemerintahan yang lemah selama periode regulasi rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi (Darmadi, 2013). Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Singly dan Sukartha (2015) menggunakan alat ukur logaritma natural total aset pada ukuran perusahaan dan *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) menggunakan alat ukur yang sama dengan penelitian Singly dan Sukartha (2015), namun hasil penelitiannya yang berbeda. Ukuran perusahaan yang digunakan menggunakan logaritma natural total aset dan *tax avoidance* dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), studi empiris pada perusahaan perbankan yang *listing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya yaitu profitabilitas, peneliti menggunakan alat ukur *Return on Assets*. Oktamawati (2017) menggunakan *return on asset* sebagai alat ukur profitabilitas dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai alat ukur dari *tax avoidance* dengan analisis linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh

Cindi Ajeng Pratiwi, 2019

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin profitabilitas tinggi maka semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak berarti perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan, perusahaan berpenghasilan tinggi jadi untuk mengeluarkan atau membayar pajak tidak ada masalah karena memiliki arus kas yang cukup untuk membayar pajak. Didukung dengan penelitian Alfajri (2016) menggunakan *return on asset* sebagai alat ukur profitabilitas dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai alat ukur dari *tax avoidance* dengan analisis linier berganda yang menunjukkan bahwa hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalia (2017) yang alat ukur dari variabel profitabilitasnya menggunakan *return on asset* dan *Cash Effective Tax Rate* adalah proksi dari *tax avoidance*, dan menggunakan analisis linier berganda yang penelitiannya dilakukan pada seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan. Peneliti menggunakan proksi tersebut karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Menurut Chen et al. (2010) menjelaskan bahwa CETR digunakan karena mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan.

Selain itu CETR sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang mana Indonesia hanya mengenal beban pajak. Khoerinnisa (2017) menyarankan periode pengamatan bisa lebih dari tiga tahun, sehingga jumlah sampel penelitian dapat bertambah. Swingly dan Sukartha (2015) menyarankan agar dapat menambah rentang waktu tahun penelitian, minimal lima tahun agar dapat melihat lebih jelas lagi perilaku perusahaan terkait dengan aktivitas *tax avoidance*. Dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 2009 hingga tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan BUMN di Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2017)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.3 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan BUMN di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan BUMN di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal perpajakan, khususnya permasalahan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia, dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Direktorat Jendral Pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.